

**TESIS**

**HEGEMONI ETNIK BUGIS DI KABUPATEN NUNUKAN**



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelar Magister Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik*

Oleh :

**AKBAR NAJEMUDDIN  
E052191019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU POLITIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AKBAR NAJEMUDDIN  
NIM : E052191019  
Program Studi : Magister Ilmu Politik  
Jenjang : Strata 2 (S2)

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul **Hegemoni Etnik Bugis Di Kabupaten Nunukan**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Tesis karya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 1 Agustus 2023

Yang membuat Pernyataan,



**AKBAR NAJEMUDDIN**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**HEGEMONI ETNIK BUGIS DI KABUPATEN NUNUKAN**

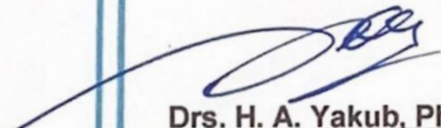
Disusun dan diajukan oleh  
**AKBAR NAJEMUDDIN**  
E052191019

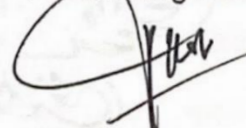
Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **1 AGUSTUS 2023**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,


  
**Drs. H. A. Yakub, Ph.D.**  
NIP. 19621231 199003 1 023

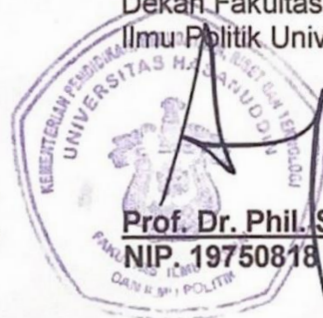
  
**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si**  
NIP. 19730813 199802 2001

Ketua Program Studi  
Ilmu Politik,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,

  
**Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19710705 199803 2002.

  
**Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19750818 200801 1008



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis hingga saat ini diberikan kesehatan serta dapat menyelesaikan karya ilmiah tesis ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar magister di Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Tesis ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta. yaitu bapak Beddu Colli dan Mama sitti mardawiah, yang selalu memberikan dukungan disertai doa yang selalu dipanjatkan dan diucapkan dalam setiap sujudmu untuk Ananda tercinta. Bapak dan mama anakmu telah bertumbuh dengan perjalanan panjang untuk menerpa diri agar supaya kedepan menjadi kuat dan dewasa menghadapi setiap dinamika kehidupan. Terimakasih telah menjadi guru kehidupan, terimakasih atas semua ketulusan yang engkau beri. Buat saudara ku tercinta kaka Muliadi dan adinda muh yusuf, saya tahu pilihan hidup kita berbeda namun saya percaya doamu dalam sujudmu selalu menyebut namaku, disertai dengan aminmu.

Penulis menyadari selesainya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan

kepada penulis dalam pembuatan tesis ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
3. **Bapak Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini,
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP. M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zulhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP.M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.

6. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak, **Prof. Muhammad, S.IP., Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si, Prof, Dr. Pawennari Hijjang, MA., Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D dan ibu Dr. Gustiana A. Kambo, S.I.P., M.Si.** atas waktu dan kesiapanya memberikan masukan kepada penulis demi kebaikan dan penyempurnaan tulisan ini.
7. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP Unhas tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
8. Terima kasih penulis ucapkan kepada kakanda Rahmad M. Arsyad dan kakanda Endang Sari beserta keluarga atas dukungan, arahan dan bantuannya sehingga penulis dapat melanjutkan Pendidikan di pasca ilmu politik unhas. Kakak Endang adalah orang yang pertama mendukung penulis untuk melanjutkan studi di pasca ilmu politik Unhas, kebaikan ini penulis tidak bisa lupakan. Terima kasih telah menjadi kakak dan guru bagi penulis.
9. Terima kasih penulis ucapkan kepada Wina, Aya, dan Marko yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam banyak hal. Tanpa bantuan kalian mungkin saya tidak dapat menyelesaikan Pendidikan ini.
10. Terima kasih kepada orang – orang baik yang selalu mendukung dan membantu penulis, Kak Rahmat, Kak Fadly, Kak Cenne, Kak Indra, Kak Inyol, Kak Aco, Ona, Bisma, Kamal, Angel, Arifin, Dewang, Wita, Fariq, Kaisar dan Aul.

11. Terima kasih kepada teman - teman seperjuangan di integritas ide Celebes Cali, Mar'i Tommy, Wawan, Tomo dan Widya jangan Lelah untuk terus berikhtiar insyaallah proses tidak akan pernah mengkhianati hasil.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada **Indonesia Development Engineering and Consultan (IDEC)**, yang selama ini telah menerpa dan memberikan banyak pelajaran kehidupan yang sangat berharga.
13. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terima kasih atas dukungan dan dorongannya selama penulis memimpin lembaga. Tanpa Himapol, penulis tidak akan bisa seperti ini. Terima kasih.
14. Kepada teman-teman seperjuangan pasca ilmu politik unhas Kak Cenne, Harun, Raihan, Fikar, Yusril, Hidayat, Syahrir, Sri, Wil, Nining, Besse, Dan Wardah terimakasih telah membersamai penulis selama ini dalam mengarungi Samudra Pendidikan di prodi ilmu politik unhas.
15. Tulisan ini saya persembahkan dan dedikasikan kepada bapak H danni Iskandar (alm) beserta keluarga. Terimakasih telah memberikan fasilitas yang maksimal selama penulis melakukan penelitian di Nunukan. Kebaikan yang kau berikan takkan sanggup penulis bayar. Semoga kakanda damai dan tenang disana. Amin.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan kemahasiswaan penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

**Makassar, 27 Juli 2023**

**Akbar Najemuddin**



## ABSTRAK

**Akbar Najemuddin.** *hegemoni etnik bugis di kabupaten Nunukan.* (dibimbing oleh **Andi Yakub** dan **Gustiana A. Kambo**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan nilai *tellu cappa* etnik bugis di Kabupaten Nunukan. Selain itu penelitian diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana bentuk penguasaan etnik bugis di Kabupaten Nunukan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data sekunder yang dikumpulkan melalui kajian pustaka dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis terhadap hasil wawancara berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori hegemoni beserta konseptualisasi etnik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etnik bugis dalam membangun hegemoni di Kabupaten Nunukan memanfaatkan nilai *tellu cappa*, yaitu dengan membangun komunikasi (*cappa lila*) yang baik dengan etnik asli dan etnik lainnya, melakukan perkawinan antar etnik (*cappa orowane*), dan keberanian etnik bugis dalam mempertahankan harga diri di perantauan (*cappa kawali*). Sementara penguasaan etnik bugis di kabupaten Nunukan dilihat dari keberadaan orang bugis yang telah menguasai sektor perekonomian dan politik di Kabupaten Nunukan.

**Kata kunci:** Hegemoni, *Tellu Cappa*, Bugis.

## **ABSTRACT**

**Akbar Najemuddin.** Bugis ethnic hegemony in Nunukan district. (supervised by **Andi Yakub** and **Gustiana A. Kambo**).

This study aims to determine the utilization of the *tellu cappa* value of the Bugis ethnic in Nunukan Regency. In addition, the research is expected to be able to describe how the Bugis ethnic control forms in Nunukan Regency.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this study are primary data obtained from interviews and secondary data collected through literature review and documentation. The data analysis method used is a descriptive analysis method of analyzing the results of interviews based on the theoretical framework used in this study. The theory used is the theory of hegemony and ethnic conceptualization.

The results showed that the Bugis ethnic in building hegemony in Nunukan Regency took advantage of the value of *tellu cappa*, namely by building good communication (*cappa lila*) with the local ethnic and other ethnic groups, conducting inter-ethnic marriages (*cappa orowane*), and the courage of the Bugis ethnic in defending prices. abroad (*cappa kawali*). Meanwhile, control of the Bugis ethnic group in Nunukan Regency can be seen from the presence of Bugis people who have controlled the economic and political sectors in Nunukan Regency. Mastery of the Bugis in the economic sector can be seen from the control of agricultural land and trade while in the political sector the Bugis gain trust as regional heads in Nunukan Regency.

**Keywords:** *Hegemony, Tellu Cappa, Bugis.*

## DAFTAR ISI

TESIS.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Akademik.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis .....	8
BAB II .....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Teori Hegemoni .....	9
2.2 Konseptualisasi Etnik .....	14
2.2.1 Pengertian Etnik.....	14
2.2.2 Etnik Sebagai Kekuatan Politik .....	16
2.3 Penelitian Terdahulu .....	22
2.4 Kerangka Pemikiran .....	25
2.5 Skema Pemikiran.....	26
.....	26
BAB III METODE PENELITIAN .....	27

<b>3.1 Tipe Penelitian .....</b>	<b>27</b>
<b>3.2 Lokasi Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>3.3 Sumber Data dan Informan Penelitian .....</b>	<b>28</b>
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>30</b>
<b>3.5 Teknik Analisis Data.....</b>	<b>34</b>
1. Reduksi Data .....	35
2. Data Display .....	36
3. Penarikan Kesimpulan .....	36
<b>BAB IV .....</b>	<b>38</b>
<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
<b>4.1 Sejarah Kabupatenn Nunukan.....</b>	<b>38</b>
<b>4.2 Demografi Penduduk Kabupaten Nunukan .....</b>	<b>39</b>
<b>4.3 Etnisitas di Kabupaten Nunukan .....</b>	<b>41</b>
4.3.1 Kondisi Objektif Etnik Asli Kabupaten Nunukan .....	43
4.3.2 Etnik Pendatang.....	48
4.3.4 Komunitas Etnik di Kabupaten Nunukan .....	50
<b>BAB V .....</b>	<b>52</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>5.1 Pemanfaatan Nilai <i>Tellu Cappa</i> Orang Bugis di Kabupaten Nunukan dalam Beradaptasi .....</b>	<b>56</b>
5.1.1 Kemampuan Membangun Komunikasi ( <i>Cappa Lila</i> ).....	57
5.1.2 Perkawinan Antar Etnis ( <i>cappa orowane</i> ).....	61
5.1.3 Berani dalam Mempertahankan Harga Diri ( <i>cappa kawali</i> ). 65	
<b>5.2. Penguasaan Bugis di Kabupaten Nunukan.....</b>	<b>71</b>
5.2.1 Penguasaan Pada Bidang Ekonomi .....	71
5.2.1.1 Penguasaan Bidang Lahan Pertanian .....	73
5.2.1.2 Penguasaan Pada Bidang Perdagangan .....	76
5.2.2 Penguasaan pada Bidang Politik. ....	79
5.2.2.1 Kemenangan Etnik Bugis Pada Pemilihan Kepala	

Daerah .....	80
5.2.3. Implikasi Teori .....	87
<b>BAB IV .....</b>	<b>91</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>91</b>
<b>6.1. Kesimpulan .....</b>	<b>91</b>
<b>6.2. Saran .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar belakang

Kajian tentang migrasi orang Bugis telah banyak dilakukan oleh para ilmuwan, khususnya terkait dengan sejarah diaspora orang Bugis ke berbagai daerah bahkan di beberapa negara dengan menghasilkan beragam topik kajian. Seperti keberadaan orang Bugis di belahan barat Indonesia, yakni Riau, negeri Malaya, kerajaan Johor (melayu) serta daerah sekitarnya. Sementara diaspora orang Bugis di wilayah timur Indonesiaterdapat di daerah Ambon, Papua, Kalimantan, Gorontalo termasuk di daerah Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

Dalam tradisi orang Bugis diaspora atau migrasi biasanya disebut dengan istilah *sompe'* (merantau). Merantau bagi orang Bugis berarti meninggalkan kampung halamannya dengan waktu yang terbilang cukup lama bahkan sebagian orang Bugis yang melakukan perantauan menetap dan tidak kembali lagi ke daerah asalnya. Orang Bugis merupakan salah satu etnik yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di bagian timur dan tengah Sulawesi Selatan. Cerita tentang perantauan yang dilakukan oleh orang Bugis salah satunya dijelaskan oleh Andi Ima Kusuma<sup>1</sup> dengan menceritakan kisah petualangan *Opu Daeng Rilaka* yang merupakan keturunan Datu Luwu *We*

---

<sup>1</sup> Andi ima Kusuma, Migrasi dan orang Bugis, Yogyakarta:ombak, 2004, hlm. 96-106

*Tenrileleang Di Johor Malaysia* pada abad ke 17. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa orang Bugis dalam melakukan perantauan didukung oleh tradisi bahari yang dimiliki. Tradisi bahari secara sederhana dapat diartikan bahwa kehidupan orang Bugis sangat erat berhubungan dengan laut, bahkan laut menjadi bagian dari kehidupan orang Bugis. Sejarah perantauan orang Bugis dalam pandangan J. Noorduyn <sup>2</sup> menyebutkan alasan memperbaiki kehidupan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan orang Bugis meninggalkan kampung halamannya (merantau). Namun hal ini bukan berarti keadaan di daerahnya tidak subur, melainkan terjadi dua peristiwa besar yang menyebabkan stabilitas politik tidak kondusif di wilayah Sulawesi Selatan saat itu. Peristiwa yang dimaksud adalah perang Makassar dan gerakan DI/TII.

Menurut Abdur Razak Daeng Patunru <sup>3</sup> akibat dari perang Makassar melahirkan perjanjian Bongaya pada tahun 1667 dan diperbaharui pada tahun 1669, dimana salah satu perjanjian Bongaya melemahkan posisi kerajaan Gowa dengan mengakui kemenangan penjajah di bumi Sulawesi sehingga para pengikut dan sekutu kerajaan Gowa yang ikut andil membantu peperangan tidak mau tunduk dengan penjajah dan memilih meninggalkan kampung halaman seperti yang dilakukan oleh Raja Wajo.

Adapun Gerakan Darul Islam / Tantara Islam Indonesia (DI/TII) yang

---

<sup>2</sup> J. Noorduyn. *Komunitas Saudagar Wajo Di Makassar*, 2009, hlm. 126

<sup>3</sup> Abdur Razak Daeng Patunru. *Sejarah Gowa Ujung Pandang*, Yayasan kebudayaan Sulawesi Selatan, 1993. Hlm. 50-61

terjadi dalam kurung waktu tahun 1950 sampai tahun 1956. Dua peristiwa ini kemudian menjadikan banyak orang Bugis memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Berdasarkan uraian diatas telah menunjukkan beberapa narasi dan perspektif sejarah terkait diaspora dan migrasi yang dilakukan oleh orang Bugis. Nampaknya hal yang sama mendorong keberadaan orang – orang Bugis di Kabupaten Nunukan yang sampai saat ini telah menjadi etnik mayoritas di daerah ini. Keberadaan orang – orang Bugis di Kabupaten Nunukan sebagai etnik pendatang dari pulau Sulawesi Selatan menarik untuk dikaji secara mendalam sebab orang Bugis sebagai salah satu etnik pendatang justru menjadi etnik mayoritas yang kemudian menguasai hampir seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. Bahkan secara politik dapat dikatakan bahwa orang Bugis menjadi etnik dominan dalam struktur politik pemerintahan di daerah ini.

Kedatangan Etnik Bugis di Kabupaten Nunukan diperkirakan dimulai pada abad ke-17. Pada saat itu orang Bugis bertahan hidup di daerah Nunukan dengan berprofesi sebagai petani dan nelayan. Hal tersebut dapat dilihat dari jejak peninggalan para orang Bugis yang sampai saat ini masih menguasai lahan pertanian. Aktivitas bertani dan melaut menjadi pekerjaan utama orang Bugis, karena potensi wilayah Kabupaten Nunukan saat itu sebagian besar hutan dan laut.

Kehadiran etnik Bugis di Kabupaten Nunukan yang pada mulanya hanya membuka lahan pertanian lambat laun etnik Bugis mulai memasuki



bahkan menguasai beberapa pusat perekonomian yang strategis di wilayah Kabupaten Nunukan. Seperti lahan pertanian, pasar, terminal, dan pelabuhan. Kondisi ini kemudian perlahan menggeser keberadaan etnik Dayak dan etnik Tidung sebagai kelompok etnik yang dominan di daerah ini.<sup>4</sup> Penguasaan orang Bugis di Kabupaten Nunukan selanjutnya adalah pada bidang politik. Hal ini dapat dilihat dari persebaran orang Bugis yang menempati jabatan strategis di posisi pemerintahan baik dikalangan legislatif dan eksekutif. Di kalangan jabatan legislatif mayoritas anggota DPRD berasal dari etnik Bugis.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 2019 menunjukkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan sebanyak 44.0% diisi oleh Orang Bugis sedangkan Orang Tidung hanya 8% dan Orang Dayak 20%. Dominasi Orang Bugis turut diperkuat dengan terpilihnya Ketua DPRD beserta dua wakilnya yang berasal dari orang Bugis.

Sementara Dominasi kekuasaan orang Bugis pada jabatan eksekutif dapat dilihat dari kemampuan orang Bugis yang sampai saat ini masih mempertahankan posisi jabatan kepala daerah di Kabupaten Nunukan dari kalangan etnik Bugis. Sejak pertama kali melaksanakan pemilihan Kepala Daerah sampai saat ini, kemenangan selalu berasal dari calon yang beretnik

---

<sup>4</sup> Andi Ima Kesuma, 2004, Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor. Yogyakarta: Ombak. Hlm 1-20.

Bugis. Adapun nama Bupati dan Wakil Bupati Nunukan berdasarkan latar belakang etnis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1 Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Berdasarkan Etnik Sejak Tahun 2001-2020**

No	Nama	Periode	Etnik
1.	H. Hafied Ahmad – Kasmin Foret	Periode 2001-2011	Bugis – Dayak
2.	H. Basri – Asmah Gani	Periode 2011-2016	Bugis – Tidung
3.	Hj. Asmin Laura Hafied – Faridil Murad	Periode 2016-2021	Bugis – Tidung
4	Hj. Asmin Laura Hafied- Hanafiah	2021 Sampai Sekarang	Bugis – Tidung

*Sumber: diolah dari Wikipedia Kab Nunukan.*

Pada tabel diatas memperlihatkan hasil pemilihan Bupati pertama Kabupaten Nunukan sejak tahun 2000 hingga Pilkada kelima pada tahun 2020 yang selalu dimenangkan oleh kandidat calon Bupati yang berasal dari etnik Bugis. Sementara pada posisi Wakil Bupati mengalami pergantian etnik antara Orang Tidung dan Dayak. Keberhasilan orang Bugis dalam membangun kuasa di Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari filosofi rantau yang dimiliki oleh orang Bugis.

Filosofi yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh para perantau

Bugis adalah *siri'*, secara harfiah *siri'* berarti rasa malu. Bagi orang – orang Bugis yang melakukan perantauan *siri'* merupakan 'alarm' untuk memacu etos kerja agar sukses di daerah rantau. Sukses di perantauan menjadi salah satu cara orang Bugis untuk mempertahankan harga diri dan kehormatan di kalangan masyarakat sekitarnya bahkan di daerah asal mereka. Kondisi inilah yang kemudian menjadikan orang – orang Bugis di Kabupaten Nunukan dapat menjaga dan mempertahankan eksistensinya.

Orang Bugis memiliki nilai-nilai dan norma yang dijadikan pedoman dalam beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut tertanam dalam salah satu falsafah Bugis, yaitu "*kegasi sanre lopie kusitu taro sengereng*" yang berarti "dimana kutambakkan perahuku disana saya menanam budi baik". Falsafah ini berisi pesan bahwa seseorang yang merantau agar tidak jumawa, tidak sombong dan tidak bertindak sesuka hati. Falsafah ini menekankan pentingnya rasa saling menghormati dan menerima perbedaan adat istiadat dan budaya setempat, sehingga keberadaanya mampu meyakinkan masyarakat setempat untuk menerimanya menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Orang Bugis yang merantau juga memiliki strategi untuk bertahan hidup.

Strategi tersebut dikenal dengan istilah *tellu cappa*. Secara harfiah *tellu cappa* berarti tiga ujung yang merepresentasikan tiga bagian penting pada tubuh untuk bertahan hidup. Tiga ujung tersebut menjadi tahapan orang Bugis dalam melakukan penguasaan, yakni *cappa lila* (ujung lidah) atau

kemampuan melakukan diplomasi, langkah kedua *cappa orowane* (ujung kemaluan), yakni orang Bugis melakukan proses perkawinan, dan langkah ketiga menggunakan *cappa kawali* (ujung badik), yaitu dengan peperangan.

Andi Ima Kusuma<sup>5</sup> melihat bahwa orang Bugis yang melakukan *sompe'* sangat terkenal dengan kemampuan adaptasi yang cepat dengan penduduk asli. Proses adaptasi yang dilakukan oleh perantau orang Bugis dengan pemanfaatan nilai budaya orang Bugis, yang disebut dengan istilah *tellu cappa*. Pemanfaatan nilai *tellu cappa* secara sederhana dapat dilihat melalui proses negosiasi, kawin – mawin, maupun konflik antara orang Bugis dengan etnik asli Kabupaten Nunukan. penduduk asli dalam membuka lahan pertanian.

Berangkat dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait **“Hegemoni Etnik Bugis Di Kabupaten Nunukan”**.

### **1.2 Rumusan Masalah.**

1. Bagaimana pemanfaatan nilai *tellu cappa* orang Bugis di Kabupaten Nunukan?
2. Bagaimana penguasaan orang Bugis di Kabupaten Nunukan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

---

<sup>5</sup> Andi Ima Kesuma, 2004, Migrasi dan Orang Bugis: Penelusuran Kehadiran Opu Daeng Rilakka Pada Abad XVIII di Johor. Yogyakarta: Ombak. Hlm 1-20.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan Bagaimana pemanfaatan nilai *tellu cappa* orang bugis di Kabupaten Nunukan.
2. Untuk menjelaskan serta mendeskripsikan bagaimana bentuk penguasaan orang bugis di Kabupaten Nunukan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **1.4.1 Manfaat Akademik**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian politik identitas etnik.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan argumen-argumen ilmiah baru dalam melihat proses penguasaan .

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami bagaimana penguasaan dibentuk melalui pemanfaatan nilai – nilai kebudayaan.
- b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan secara utuh terkait penguasaan orang Bugis di Kabupaten Nunukan memerlukan pendekatan teoritis yang tepat agar tulisan ini mampu memahami dan menguraikan realitas temuan penelitian. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hegemoni yang dijelaskan oleh Gramsci dan konseptualisasi etnik.

#### 2.1 Teori Hegemoni

Hegemoni (*Egemonia*) dalam Bahasa Yunani berarti penguasaan satu bangsa atas bangsa lainnya. Hegemoni dalam pandangan Gramsci merupakan sebuah konsensus yakni adanya kepatuhan yang diperoleh melalui penerimaan ideologi kelas. Bagi Gramsci hegemoni tidak terbangun melalui dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi lebih kepada hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis.

Hegemoni dalam pandangan Gramsci disebutkan dapat tercipta karena adanya konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Berangkat dari penjelasan Gramsci tersebut maka dapat dikatakan bahwa konsep teori Gramsci tentang hegemoni berbeda dengan makna aslinya dalam Bahasa Yunani yang menyebutkan bahwa hegemoni merupakan penguasaan satu

bangsa terhadap bangsa lainya.<sup>6</sup>

Hegemoni berlangsung manakala suatu kelompok masyarakat telah menerima bahkan meniru cara hidup, cara berpikir, dan pandangan kelompok elit yang telah mendominasi bahkan mengeskplotasi kehidupan kelompok tersebut. Lebih lanjut dikatakan oleh Gramsci bahwa hegemoni akan melahirkan kepatuhan yakni sikap menerima keadaan tanpa mempertanyakannya secara kritis konsekuensi dari nilai ideologis tersebut.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya sikap menerima tersebut tercipta karena adanya konsensus. Adapun konsensus bagi Gramsci dimulai dari spontanitas yang bersifat psikologis yang mencakup berbagai penerimaan aturan sosio-politis maupun aspek-aspek aturan lainnya. Konsensus bisa terjadi manakala disebabkan oleh tiga hal<sup>7</sup> diantaranya

- 1) karena rasa takut akan konsekuensi – konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri;
- 2) karena biasa mengikuti tujuan – tujuan dengan cara – cara tertentu; dan
- 3) karena kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Maka dengan demikian konsensus dapat tercipta kerana dasar persetujuan.

Gramsci membagi hegemoni dalam tiga tingkatan yaitu *hegemoni*

---

<sup>6</sup> Simon Roger,2004, Gagasan Gagasan Politik Gramsci, Pustaka pelajar: Yogyakarta.Hlm.45

<sup>7</sup> Endah Siswati. 2017, Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci: Jurnal TransliteraEdisi 5.

*integral*, *hegemoni* yang merosot dan *hegemoni minimum*<sup>8</sup> *Hegemoni total (integral)*, ditandai dengan afiliasi massa yang mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh, yang tampak dari hubungan organis pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi dan antagonism baik secara sosial maupun etis.

Hegemoni yang Merosot (*decadent*), ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan, artinya meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan dan sasarnya, tetapi mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni.

*Hegemoni minimum*, adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik dan intelektual, yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasinya dengan kelas lain dalam masyarakat.

Lebih lanjut dalam membicarakan hegemoni Gramsci memberikantiga batasan konseptualisasi, yaitu ekonomi, masyarakat politik (*political society*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Ekonomi, adalah batasan yang digunakan

---

<sup>8</sup> Nezar Patria & Andi Arif. 2015. Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni. PustakaPelajar:Yogyakarta. Hlm.128



untuk mengartikan *mode of production* yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang tumbuh karena munculnya perbedaan kelas-kelas sosial, dalam arti kepemilikan produksi. Masyarakat politik (*political society*) merupakan tempat berlangsungnya birokrasi negara dan tempat munculnya praktek-praktek kekerasan negara. Birokrasi negara, dalam pemahaman Gramsci diidentifikasi sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan dan institusi pendidikan.

Gramsci memakai istilah masyarakat politik untuk menunjuk hubungan-hubungan koersif yang terwujud dalam berbagai lembaga negara - angkatan bersenjata, polisi, lembaga hukum dan penjara, bersama dengan semua departemen administrasi yang mengurus pajak, keuangan, perdagangan, industri, keamanan sosial, dan sebagainya. Gramsci menyatakan bahwa aktivitas negara tidak hanya sekedar melakukan tindakan koersif, tetapi juga berperan dalam membangun konsensus melalui pendidikan dan fungsi kelembagaan. Masyarakat sipil (*civil society*) menunjuk pada organisasi lain, selain negara, dan di luar sistem produksi material dan ekonomi, yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen di luar sistem produksi dan negara. Dalam suratnya tanggal 7 September 1931, Gramsci menunjukkan bahwa masyarakat sipil mencakup apa yang disebut organisasi-organisasi swasta (*private*), seperti gereja, serikat dagang, sekolah, dan sebagainya. Gramsci juga menambahkan bahwa dalam

masyarakat sipil kaum intelektual menjalankan tugasnya secara khusus menunjukkan bahwa masyarakat sipil mencakup apa yang disebut organisasi-organisasi swasta (*private*), seperti gereja, serikat dagang, sekolah, dan sebagainya. Gramsci juga menambahkan bahwa dalam masyarakat sipil kaum intelektual menjalankan tugasnya secara khusus.<sup>9</sup>

Berangkat dari pandangan Gramsci di atas maka pemikiran hegemoni Gramsci dapat dilihat sebagai upaya untuk menggiring orang lain atau kelompok etnik tertentu untuk menilai dan memandang kondisi sosial dalam kerangka yang ditentukan oleh kelompok yang hendak membangun hegemoni. Maka pada titik inilah pemikiran Gramsci tentang hegemoni dibangun tidak melalui paksaan tetapi dibangun melalui ideologi (nilai). Ideologi bisa saja mencakup nilai budaya, adat istiadat, agama dan seterusnya. Sehingga hegemoni dapat terbangun melalui produk-produk budaya, adat, dan agama yang seolah-olah menjadi penentu dari sesuatu yang dipandang baik dan benar baik secara moral maupun secara intelektual.

Pada struktur masyarakat yang multi etnik, potensi munculnya hegemoni satu etnik terhadap etnik lain yang berujung pada dominasi sangat dimungkinkan. Hal ini karena adanya nilai-nilai dan kebudayaan yang saling berinteraksi satu sama lain. Maka pada titik inilah kebudayaan suatu etnik dapat dilihat sebagai sesuatu yang bersifat ideologis. Sifat ideologis

---

<sup>9</sup> Endah Siswati. 2017, Anatomi Teori Hegemoni Antonio Gramsci: Jurnal Translitera Edisi 5. Hlm.23

yang dimaksudkan adalah kemampuan suatu nilai kebudayaan yang dibangun melalui proses yang adaptif.

## **2.2 Konseptualisasi Etnik**

### **2.2.1 Pengertian Etnik**

Kata etnik berasal dari bahasa Yunani yaitu<sup>10</sup> *ethnos*, yang mengacu pada suatu pengertian (identik) pada dasar geografis dalam suatu batas – batas wilayah dengan system politik tertentu. Kata etnik identik dengan predikat seseorang atau kelompok. Dalam konteks Indonesia biasanya identik dengan penyebutan seseorang atau kelompok yang menjadi Jawa, Bugis, Dayak, Papua, Tidung dan kelompok masyarakat lainnya. Predikat tersebut merupakan sesuatu yang *taken for granted* sejak awal penciptaan (kelahiran). Weber dalam mendefinisikan etnik lebih menekankan pada perspektif konstruk, di sini etnik menurut Weber merupakan identitas suatu kelompok atas dasar kepercayaan yang sama dari segi kultur *common descent* dan Bahasa. Untuk itu, Weber menganggap basis etnik adalah kepercayaan yang bersifat subjektif. Dengan demikian relasi antar etnik merupakan identitas “pembeda” yang terjadi antar kelompok etnik yang dapat dilakukan melalui terpaan

---

<sup>10</sup> Ubed Abdillah S. 2002 . Politik Identitas Etnik, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Magelang : Yayasan Indonesiatara. Hlm.75.

monopolistik sosial dan internal kelompok etnik melalui keragaman bentuk etnik dari organisasi sosial. Lebih lanjut Weber dalam kajiannya mempertegas tema etnisitas dan relasi antar etnik kedalam empat prinsip utama terkait etnisitas. Adapun keempat prinsip tersebut yakni, (1). Etnisitas sebagai bentuk dari status kelompok, (2). Etnisitas sebagai mekanisme dari terpaan monopolistik sosial, (3). Keragaman bentuk etnik dari organisasi sosial, dan (4). Etnisitas dan mobilisasi politik.

Berdasarkan dari uraian Max Weber diatas kemudian Sofyan Syaf<sup>11</sup> menarik beberapa asumsi terkait relasi antar etnik diantaranya, (1). Setiap tindakan sosial tidak luput dari Tindakan yang bernuansa etnisitas ; (2). Konflik terjadi manakala ditemukan upaya yang dilakukan kelompok etnik tertentu untuk memperoleh keuntungan simbolis dari kelompok etnik lainnya; (3). Tindakan politik etnik dalam dinamika politik mencerminkan perilaku kelompok etnik yang bersangkutan. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, Fredrik Barth sebagai salah satu pemikir yang menjelaskan etnik dalam pendekatan konstruktivisme, mendefinisikan etnik sebagai suatu populasi yang secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam satu bentuk budaya. Penjelasan Fredrik Barth ini apabila ditarik dalam kajian antropologi yang dikembangkan oleh oleh

---

<sup>11</sup> Sofyan Sjaf. 2014. Politik Etnik "Dinamika Politik Lokal Di Kendari" Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia. Hlm.18.

Narrol<sup>12</sup> mengasumsikan kelompok etnis sebagai suatu populasi yang (1). Secara biologis mampu berkembang biak dan bertahan, (2). Mempunyai nilai – nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaannya dalam satu bentuk budaya, (3). Membentuk jaringan komunikasi dan interaksinya sendiri, (4). Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain. Berdasarkan penjelasan diatas maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa etnik dapat dipahami sebagai suatu suku bangsa yang mempunyai budaya serta memiliki Bahasa sendiri sebagai alat komunikasi tersendiri dalam komunitasnya. Pada situasi ini etnik menjadi satu unit yang hidup terpisah dengan sub etnik lainnya.

### **2.2.2 Etnik Sebagai Kekuatan Politik**

Identitas etnik sebagai sebuah kekuatan kelompok yang terbentuk dengan batasan – batasan tertentu menjadikan etnik tidak dapat dipisahkan dengan wacana kekuasaan. Studi yang dilakukan oleh Bracket Williams<sup>13</sup> menunjukkan telah terjadi pertarungan dan perjuangan untuk merebut “dominasi simbolik” pada masyarakat Guyana. Selanjutnya studi yang dilakukan oleh Gustiana A Kambo<sup>14</sup> terkait

---

<sup>12</sup> Ubed Abdillah S. 2002 . Politik Identitas Etnik, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Magelang : Yayasan Indonesiatera. Hlm.77.

<sup>13</sup> Sofyan Sjaf. 2014. Politik Etnik “Dinamika Politik Lokal Di Kendari” Jakarta: Yayasan Puataka Obor Indonesia. Hlm. 27.

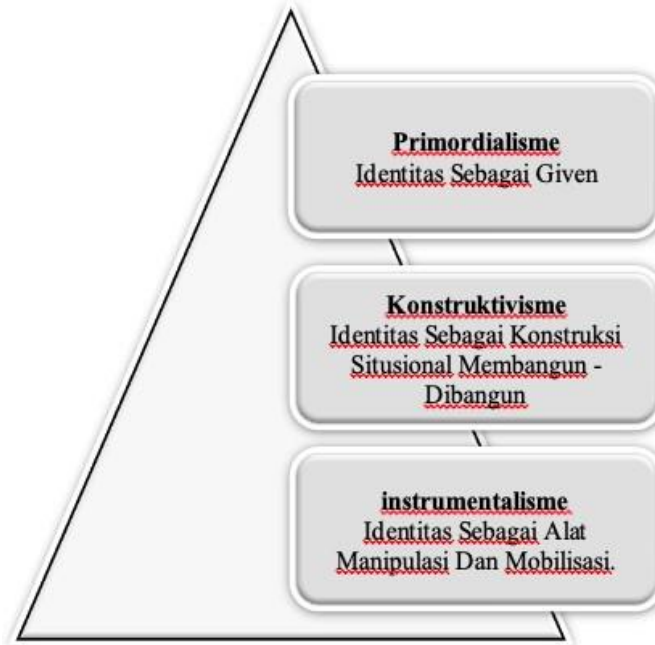
<sup>14</sup> Gustiana Kambo memahami politik identitas pemikiran tentang pencarian identitas etnik. Sebuah kajian dalam pembentukan provinsi Sulawesi barat. Makalah disampaikan pada seminar internasional percik dengan tema dinamika politik lokal di indonesia 15-17 juli 2008.

terbentuknya provinsi Sulawesi Barat akibat adanya politik perbedaan juga menyatakan demikian. Dimana etnik Mandar merasa didominasi oleh etnik Bugis. Berangkat dari dua studi diatas maka etnik dalam wacana kekuasaan memang sulit terhindarkan dari pembahasan relasi antar etnik. Selain itu melalui dua studi tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat usaha yang dilakukan oleh etnik tertentu untuk mendirikan hegemoni kelompok etniknya terhadap etnik lainnya. Pada titik ini kemudian dapat disimpulkan bahwa interaksi dalam kehidupan demokrasi merupakan medan pertempuran atau persaingan antar etnik dalam meraih penguasaan atas etnik lainnya. Fenomena etnisitas sebagai kekuatan politik dapat dilihat dalam tigapendekatan utama. Ubed Abdillah, menjelaskan tiga perspektif teoritis dalam mengkaji politik identitas yaitu: primordialisme, konstruktivisme, dan instrumentalisme.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Ubed Abdillah S. 2002 . Politik Identitas Etnik, Pergulatan Tanda Tanpa Identitas, Magelang : Yayasan Indonesiatara. Hlm.76-77.

Diagram 2. Tiga Perspektif Teoritis Dalam Mengkaji Politik Identitas.



Pendekatan pertama adalah primordialisme melihat fenomena etnis dalam kategori sosio-biologis. Pendekatan ini umumnya beranggapan bahwa kelompok-kelompok sosial yang dilihat berdasarkan ke wilayahan, agama, kebudayaan, bahasa dan organisasi sosial dipandang sebagai objek yang sifatnya “given” dan tidak bisa dibantah. Pendekatan ini terbukti mempunyai pengaruh terhadap gambaran sosial masyarakat. Pendekatan kedua adalah konstruktivisme yang dikembangkan oleh Frederik Barth. Teori ini memandang identitas etnis dan budaya, merupakan hasil dari proses yang sangat kompleks apabila batasan simbolik terus dibangun dan membangun oleh manfaat mitologi yang dilangsungkan melalui bahasa maupun kebiasaan

masa lalu. Frederich Barth dalam penelitian Endang Sari<sup>16</sup> lebih jauh berargumentasi bahwa agama dan etnisitas mengalami perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok etnik sering dinegosiasikan kembali. Tergantung pada perjuangan politik di antara kelompok-kelompok yang ada.

Dalam pandangan Frederich Barth fenomena negosiasi identitas ini merupakan strategi situasional. Maka pada kondisi ini para aktor politik berupaya sedemikian rupa untuk menampilkan perilaku elit yang berubah ubah – ubah dari waktu ke waktu, sesuai dengan kondisi tertentu yang dianggap dapat memberikan keuntungan sesuai dengan kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Strategi situasional ini biasa juga disebut sebagai etnik situasional, etnik situasional merupakan sesuatu yang sangat diperlukan oleh aktor politik untuk membangun citra diri (*self image*) dan harga diri (*self esteem*) yang dikomunikasikan baik sebagai individu maupun kelompok. Negosiasi identitas inilah yang kemudian, dikomunikasikan, diolah ataupun dikonstruksi dalam berinteraksi.

Lebih lanjut menurut Barth walaupun seseorang atau individu memiliki beragam sisi dalam hal mengungkapkan identitasnya namun pada dasarnya identitas yang bernuansa etnik dan agama selalu tampil menjadi pembeda utama dalam membangun kategori identitasnya. Pada batas ini kemudian

---

<sup>16</sup> Endang Sari, kebangkitan politik identitas pada arena pemilihan gubernur Jakarta. Jurnal ilmu social dan ilmu politik universitas hasanuddin. Volume 2 no.2 desember 2016.



konsep identitas situasional memberikan pandangan bahwa setiap orang akan melakukan proses interaksi yang dilakukan melalui pertukaran simbol dengan membentuk makna yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

Proses interaksi ini kemudian akan saling mempengaruhi antara identitas pribumi dan identitas pendatang yang selanjutnya budaya pribumi akan dipengaruhi oleh budaya pendatang dan begitupun sebaliknya. Pada tahap ini kemudian Barth<sup>18</sup> menjelaskan dua pandangan terkait ini: Pertama, batas-batas budaya dapat bertahan walaupun suku- suku tersebut saling berbaur. Dengan kata lain adanya perbedaan etnik dan agama tidak ditentukan oleh terjadinya pembauran, kontak dan pertukaran informasi, namun lebih disebabkan oleh adanya proses- proses sosial berupa pemisahan dan penyatuan. Pandangan Barth ini melihat bahwa perbedaan kategori tetap dipertahankan walaupun terjadi pertukaran peran serta keanggotaan di antara unit-unit etnik dan agama dalam perjalanan hidup seseorang. Semuanya dijadikan relasi penting untuk mempertahankan kekuasaan etnik. Kedua, dapat ditemukan hubungan sosial yang kuat, bertahan lama, dan penting di antara dua kelompok etnik dan agama yang berbeda.

Kondisi ini biasanya terjadi karena adanya status etnik dan agama yang berbeda tidak ditentukan oleh tidak adanya interaksi dan penerimaan sosial. Tetapi menurut Barth, status sosial etnik dan agama terbentuk oleh sistem sosial tertentu. Setiap etnik dan agama dapat berkembang dan bertahan serta

mempunyai nilai-nilai budaya dan moral sehingga menjadi ciri khas identitas itu sendiri dalam berinteraksi.

Berangkat dari penjelasan konstruktivisme Barth diatas yang meyakini bahwa pembentukan batas – batas dari identitas individu atau kelompok dengan membentuk polanya sendiri bukan berarti serta merta harus dijadikan alasan untuk membangun narasi politik identitas dalam mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebab adanya perbedaan identitas etnik, agama, budaya maupun bahasa dalam masyarakat lebih disebabkan sebagai wujud untuk mempertahankan status etnik, agama, budaya maupun Bahasa dalam masyarakat yang multikultural.

Pendekatan ketiga adalah pendekatan instrumentalisme memberikan perhatian pada proses manipulasi dan mobilisasi politik atas dasar kesamaan identitas, agama, etnik dan ras termasuk ke wilayahan yang terorganisir. Para penganut kalangan instrumentisme lebih jauh menjelaskan bahwa identitas etnik senantiasa dijadikan alat bagi elit politik untuk melakukan manipulasi identitas etni, demi meraih keuntungan.

Wujud dari mobilisasi politik identitas seperti ini dapat dilihat dari munculnya narasi – narasi politik yang mengedepankan politik perbedaan seperti “pribumi dan nonpribumi”, “saya islam anda bukan”, “saya orang asli kamu pendatang”. Narasi politik identitas semacam ini tentunya merupakan upaya yang digunakan oleh elit politik untuk membangun citra diri dan harga

diri dalam membentuk kekuatan politik.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dan lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya, berikut beberapa judul penelitian yang memiliki kesamaan objek penelitian dengan penelitian ini:

1. Artikel jurnal yang ditulis oleh Usman Idris pada tahun 2017 dengan judul **“Belimpun Taka Tugas Insuai Taka Tapu’ Orang Tidung Marjinalisasi Dan Perlawanan Di pulau Sebatik Dan Nunukan”** menguraikan terkait stereotip yang dilekatkan oleh para kelompok etnis pendatang terhadap orang Tidung dan berbagai ketertinggalan yang dialami mereka membuat mereka termarginalkan dari berbagai aspek, terutama ekonomi, penguasaan lahan, pendidikan dan pemerintahan, sehingga meskipun orang Tidung adalah penduduk asli di Pulau Sebatik mereka adalah etnis minoritas dan dikuasai oleh etnis pendatang, terutama oleh etnik Bugis. Selain itu dalam artikelnya penulis juga menguraikan terkait perlawanan yang dilakukan oleh etnik Tidung bukanlah sebuah bentuk perlawanan terbuka yang memicu konflik antar etnis, melainkan perlawanan dengan mengembangkan

strategi investasi simbolik untuk kekuasaan yang dimiliki sehingga dapat membentuk prestise.

2. Skripsi yang ditulis oleh Novianti pada tahun 2014 dengan judul **“Etnisitas Dalam Manajemen Pemerintahan Daerah, Studi Kasus Di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara”**, mengurai terkait jumlah etnis yang ada di daerah Kabupaten Nunukan yang terdiri dari 15 etnis. Dari 15 etnis tersebut 8 etnis diantaranya mayoritas yaitu, etnis Bugis, Mandar, Toraja, Banjar, Tidung, Dayak, Jawa dan Timor. Selain itu dalam artikel ini penulis juga menguraikan terkait Kabupaten Nunukan merupakan daerah multi etnik yang memiliki potensi konflik yang besar, baik konflik lisan maupun konflik fisik yang banyak terjadi akibat dari persepsi etnis dan ikatan primordial yang masih kental. Selanjutnya adalah faktor identitas etnis sebagai penyebab konflik berkaitan dengan perbedaan- perbedaan persepsi yang terdapat pada kelompok suku bangsa yang sedang mengadakan hubungan interaksi dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelola etnisitas di daerah Kabupaten Nunukan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Kristianus pada 2016 yang berjudul **“Politik dan Strategi Budaya Etnik Dalam Pilkada Serentak di Kalimantan Barat”**, mengurai terkait pasangan calon yang diusung pada Pilkada diprovinsi Kalimantan barat berbasis etnisitas dan Identitas etnik telah

menjadi orientasi budaya politik identitas yang terlembagakan.

4. Skripsi yang ditulis oleh Erikson Silaban yang berjudul "**Dominasi Etnik Toba Studi Deskriptif Dalam Kehidupan Masyarakat Kabupaten Dairi**", mengurai terkait Kebudayaan Toba sebagai kebudayaan dominan di Dairi sebenarnya terjadi secara tidak disadari atau karena faktor lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa kehidupan masyarakat Dairi sangat beragam dilihat dari latar belakang etnik, namun di tengah keberagaman tersebut etnik Toba merupakan kelompok masyarakat mayoritas yang sangat berpegangteguh pada adat istiadat. Bagi etnik Toba adat sangat penting dan pemenuhannya selalu diutamakan. Kedekatan wilayah Dairi dengan wilayah Toba dan kemiripan budaya Toba dengan budaya Pakpak juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya dominasi etnik Toba dalam kehidupan masyarakat Dairi. Kemiripan budaya menimbulkan interaksi kedua budaya terjadi dengan baik dan saling bertumbuh. Budaya Toba yang merupakan salah satu kebudayaan etnik pendatang ternyata mampu mengimbangi seluruh kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Dairi.

Berangkat dari penjelasan tabel diatas, maka penulis melihat adanya perbedaan yang ditemukan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada pemanfaatan nilai tellu cappa yang

dilakukan oleh orang Bugis terhadap etnik asli Kabupaten Nunukan yang kemudian menjadi temuan pada thesis ini dan akan dijelaskan lebih lanjut pada bab V (Lima).

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Orang Bugis merupakan salah satu etnik pendatang di Kabupaten Nunukan. Dari sekian banyak etnik di Kabupaten Nunukan terdapat dua etnik asli di daerah ini diantaranya etnik Tidung dan etnik Dayak. Berdasarkan latar belakang sejarah, sebelum datangnya orang – orang Bugis di Kabupaten Nunukan daerah ini didominasi oleh etnik Etnik Tidung dan etnik Dayak sebagai penduduk asli tanah Nunukan.

Pasca kehadiran orang Bugis di daerah Nunukan pada abad ke 17 sampai saat ini Kehidupan sosial dan struktur sosial di daerah ini dikuasai oleh orang Bugis. Hal ini dapat dilihat dari dominannya orang Bugis dalam menguasai bidang ekonomi dan politik di tanah Nunukan. Pada bidang ekonomi orang Bugis di Kabupaten Nunukan telah menguasai lahan pertanian dan perdagangan. Sementara pada bidang politik orang – orang Bugis juga tampil menjadi kepala daerah di Kabupaten Nunukan semenjak tahun 1999 sampai sekarang.

Keberhasilan orang – orang Bugis dalam membangun kuasa di Kabupaten Nunukan tidak terlepas dari kemampuan orang Bugis dalam membangun adaptasi dengan etnik lainnya di Kabupaten Nunukan termasuk

etnik Dayak dan Tidung sebagai etnik setempat. Strategi adaptasi yang dibangun oleh orang Bugis di Kabupaten Nunukan dapat dilihat dari pemanfaatan nilai *tellu cappa*.

Filosofi *tellu cappa* yang dimaksud yakni *cappa lila* (ujung lidah) atau kemampuan melakukan diplomasi, langkah kedua *cappa orowane* (ujung kemaluan) dengan melakukan perkawinan, dan yang ketiga *cappa kawali* (ujung badik) dengan berani membela diri.

## 2.5 Skema Pemikiran

